

**FUNGSI PENGORGANISASIAN DI MAJELIS ULAMA
INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR DALAM
PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Dakwah

Oleh :

ALMARTIN ANIS K.
NIM: BO.4300089



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

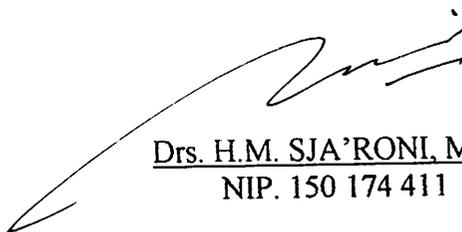
2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh ALMARTIN ANIS K. ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Januari 2005

Pembimbing,



Drs. H.M. SJA'RONI, M.Ag
NIP. 150 174 411

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh **Almartin Anis K.** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 04 Februari 2005

Mengesahkan,

Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag

NIP. 150 216 541

Ketua,

Drs. H. M. Sja'roni, M.Ag

NIP. 150 174 411

Sekretaris,

Drs. M. Taqwim Suji

NIP. 150 190 295

Penguji I,

Drs. H.M. Nadim Zuhdi, MM.

NIP. 150 152 383

Penguji II,

Drs. Moch. Muchtarom, M.Ag

NIP. 150.243 978

ABSTRAKSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Almartin Anis K 2005 : Fungsi Pengorganisasian di Organisasi Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Dakwah Islam

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana aktivitas MUI dalam pengembangan dakwah Islam (2) Bagaimana fungsi pengorganisasian di MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bersifat kaulitatif dalam menganalisa aktivitas MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah, fungsi pengorganisasian di MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah data yang digunakan berupa buku, dokumentasi, wawancara, observasi

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aktivitas MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program yang ada meskipun hanya sebagian program. Mengenai fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah, MUI membentuk komisi pengembangan dakwah dan tarbiyah dan telah dibentuk susunan pengurusnya.

Berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut penelitian ini belum menjawab lebih jauh mengenai aktivitas MUI dalam pengembangan dakwah Islam dan fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam. Kiranya ada masalah penelitian yang meneliti tentang evaluasi program kerja pengembangan dakwah Islam MUI Jawa Timur.



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG 1 D-2005/MD/012
ASAL BUKU:	
TANGGAL :	

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konsep	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : PERSPEKTIF TEORITIS	
A. Kajian Kepustakaan Konseptual	11
B. Kajian Kepustakaan Penelitian	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Wilayah Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Tahap-tahap Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisa Data	37
G. Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Lokasi Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur	39
B. Latar Belakang Berdirinya	39
C. Tujuan Didirikannya MUI	43
D. Perkembangan MUI	43
E. Susunan Pengurus MUI Propinsi Jawa Timur	45

BAB V : PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA	
A. Penyajian Data	52
1. Visi dan Misi MUI	52
2. Orientasi dan Fungsi/Peran MUI	52
3. Rincian Program Komisi-komisi	56
4. Program Komisi yang Sudah Dilaksanakan atau dalam Proses	62
B. Analisa Data	71
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar yaitu Kholifah fil Ardi dengan kata lain manusia dipandang sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu mengelola alam sekitar dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka diperlukan aturan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya Islam adalah rahmat, hidayah dan petunjuk bagi manusia yang berada di dunia dan juga peraturan dan tuntunan bagi seluruh umat manusia.

Islam menganugerahi umat manusia kenyataan spiritual sesuai dengan pemahaman manusia nilai-nilai etika dan perintah-perintah yang mencakup seluruh aspek kehidupan individu juga disebut agama dakwah yaitu agama yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam dari masa ke masa sebagaimana dikatakan dalam surat Ali Imron 104 :¹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada dari yang munkar : merekalah orang-orang yang beruntung.

¹ Departemen Agamar RI, *Tafsir dan Terjemah* (Surabaya : Mahkota, 1989) hal. 80

Dakwah mempunyai pengertian yaitu mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk menyuruh kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.

Usaha dakwah adalah usaha yang tidak pernah rampung selama denyut nadi ada kegiatan duniawi manusia masih dibiarkan berlangsung selama itu pula umat Islam berkewajiban menyampaikan Risalah kemuliaan dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun coraknya untuk menghadapi masalah-masalah yang semakin berat itu penyelenggara dakwah tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang secara sendiri-sendiri dan sambil lalu saja, akan tetapi harus diselenggarakan oleh pelaksana dakwah secara bekerja sama dalam kesatuan yang teratur dan rapi yang terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan serta mempergunakan kerja yang efektif dan efisien.

Didin Hafidhudin dalam tulisannya menegaskan bahwa di dalam menghadapi masalah yang semakin berat sebagai akibat tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi informasi dan tuntutan kebutuhan hidup maka kiranya tidaklah memadai lagi kegiatan dakwah hanya dilakukan secara perseorangan merencanakan dan mengerjakan sendiri kegiatannya akan tetapi hendaklah dilakukan dengan cara jama'i melalui kelembagaan yang ditata dengan baik dengan menghimpun keahlian yang diperlukan persoalan pendanaan yang selalu menjadi masalah kiranya dipecahkan melalui lembaga.²

Penyelenggara dakwah akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terlebih dahulu dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan dihadapi kemudian atas dasar hasil pengenalan situasi dan kondisi medan disusunlah rencana dakwah yang tepat selanjutnya untuk melaksanakan rencana yang telah disusun itu dipersiapkan pada pelaksanaan yang memiliki kemampuan, mereka yang diatur dan

² Didin Hafidhudin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hal. 78

diorganisir dalam kesatuan-kesatuan yang seimbang dengan luasnya usaha dakwah yang akan dilakukan kemudian digerakkan dan diarahkan pada sasaran atau tujuan dakwah yang akan dikehendaki.

Manajemen sangat menentukan pada organisasi dalam mencapai keberhasilan organisasi oleh karena itu organisasi yang tidak mengikuti perubahan zaman dengan sendirinya akan tertinggal dengan organisasi lainnya, untuk itu organisasi/lembaga yang ingin bersaing di era globalisasi ini harus menggunakan manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya seperti yang dikemukakan G.R. Terry bahwa arti daripada proses manajemen yaitu :

Menyusun rangkaian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*Planning*), menentukan orang-orang yang mengerjakan tugas (*Organizing*), mengerjakan orang-orang yang dipilih dengan memberikan dorongan maupun arahan untuk berusaha bekerja keras dalam mencapai tujuan (*Actuating*), mengawasi jalannya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para tenaga pelaksana dan mengukur efektifitas usaha-usaha tersebut (*Controlling*).³

Untuk itu organisasi mengikuti filosofis total quality manajemen yaitu bahwa seluruh konsep manajemen yang mengarah pada perbaikan terus menerus dan kegiatan organisasi dilaksanakan melalui kerjasama tim atau gotong royong dan tim tersebut harus memahami semua fungsi yang ada agar mempunyai keunggulan daya saing yang tinggi.⁴

Menurut G.R. Terry bahwa fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen yang bersifat aktifitas dapat dikatakan sebagai proses manajemen dan aktifitas itu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Fungsi pengorganisasian (*organizing* = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan.⁵

³ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996) hal. 19
⁴ Agus Subandi, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : OPP Amp YKPM, 1987) hal. 2
⁵ Malayu, S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hal. 22

Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa istilah pengorganisasian berasal dari kata *organism* (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan, lebih jauh istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁶

Pengorganisasian sebagai proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas tersebut.⁷ Lebih lanjut Rosyad Saleh mendefinisikan pengorganisasian sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dengan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi atau petugas-petugasnya.⁸

Pengorganisasian adalah merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.⁹

Proses penyusunan struktur organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi karena dengan struktur tersebut bisa mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam organisasi dan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi bagian-bagian dan atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

⁶ Widjaja Kusuma, M. Karebet dan Yusanto Ismail, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta : Khairul Bayan) hal. 127

⁷ Malayu, S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hal. 22

⁸ Abd. Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1997) hal. 77

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE, 1999) hal. 27

Sebuah organisasi apabila menginginkan tetap eksis survive dan solid maka dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkannya, diantaranya adalah dengan melakukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. sebagian orang kurang menyadari betapa penting arti sebuah organisasi sebagai satu sarana untuk syiar agama.

Demikian halnya dalam organisasi MUI (Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur) adalah sebuah organisasi yang potensial dan dapat dijadikan sebagai pilot project bagi organisasi Islam lainnya dalam perannya. Sebagai pelaksana dakwah memang MUI bukanlah organisasi dakwah saja akan tetapi lebih luas daripada itu di dalam MUI mempunyai beberapa komisi diantaranya adalah Komisi Pengembangan Dakwah Islamiyah, Komisi Pengembangan Hukum dan perundang-undangan. Selain itu terbukti dari beberapa usahanya antara lain : mengeluarkan produksi fatwa agama tentang penggunaan hewan cicak (*Hemadactulus sp*), tokek (*Goeteo sp*), dan kadal (*Mabaya sp*) sebagai bahan obat.¹⁰

Obyek penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur dengan fokus fungsi pengorganisasian.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang fungsi pengorganisasian yang ada dalam manajemen dan apakah MUI Jawa Timur sudah benar-benar mengaplikasikan secara profesional sesuai dengan teori-teori yang ada, karena sejauh sepengetahuan penulis ada yang meneliti di MUI Jawa Timur tentang perencanaan. Oleh sebab itu penulis meneliti tentang pengorganisasian.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

¹⁰ Abdus Shomad Bukhori, dkk, *101 Masalah Hukum Islam dan Sebuah Produk Fatwa MUI* (Surabaya : Propinsi Jawa Timur dan Pustaka Dai Muda) hal. 169.

1. Bagaimana aktivitas organisasi MUI dalam pengembangan dakwah Islam ?
2. Bagaimana fungsi pengorganisasian di MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- Untuk mengetahui aktivitas organisasi MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam.
- Untuk mengetahui bagaimana fungsi penerapan pengorganisasian pengurus MUI dalam memanaj organisasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi organisasi.

Sebagai bahan masukan bagi organisasi majelis ulama Indonesia dan organisasi Islam pada umumnya agar hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi dan dapat dipergunakan sebagai alat motivasi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen.

2. Bagi fakultas.

Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya bagi jurusan MD dan umumnya bagi akademik.

3. Bagi penulis.

Bagi penulis diharapkan melalui penelitian secara teori atau kanca (lapangan) akan dapat memberikan wawasan dalam mengembangkan diri sendiri meningkatkan profesionalitas penulis di bidang ilmu manajemen dakwah

E. Definisi Konsep

Konsep atau pengertian merupakan unsur-unsur pokok dari suatu penelitian konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok faktor atau gejala-gejala yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

- Pengorganisasian

Judul fungsi pengorganisasian di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam supaya lebih mudah untuk dipahami, maka ada beberapa konsep yang perlu dijalankan yang ada hubungannya dengan judul penelitian, diantaranya :

- Fungsi adalah pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan.¹²
- Pengorganisasian yaitu penetapan kegiatan khusus yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang direncanakan dan mengelompokkan kegiatan ke dalam pola, rangka dasar / struktur yang logis serta mengarahkan kegiatan kepada jabatan / organisasi-organisasi khusus.

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga diterapkan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

¹¹ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal. 21

¹² Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994) hal. 238

¹³ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 1994) hal. 644

¹⁴ Malayu, S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hal. 5

Jadi fungsi pengorganisasian adalah pekerjaan menetapkan kegiatan khusus yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang direncanakan, pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam pola, rangka dasar atau struktur yang logis dan menyerahkan kegiatan kepada jabatan dan orang-orang khusus.

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan. G.R. Terry menyatakan bahwa istilah pengorganisasian diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kumpulan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam lingkungan tertentu guna mencapai tujuan / sasaran tertentu.¹⁵

- Organisasi

James D. Money menyatakan organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan Chester I Bernard memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁶

- Pengembangan

Pengembang/mengembangkan dapat berarti menjadikan berkembang (maju, sempurna, dan sebagainya).¹⁷

- Dakwah

Dakwah berasal dari kata Arab (**Da'wah**) dari kata (**Da'a, Yad'uu**) yang berarti panggilan ajakan seruan.¹⁸

Dakwah dalam pengertian khusus berarti mengajak baik pada diri sendiri maupun orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

¹⁵ Karebet dan Ismail, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta : Khoiril Bayan) hal. 127

¹⁶ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996) hal. 67

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hal.

¹⁸ M. Ali Azis, *Ilmu Dakwah* (Diktat Fakultas Dakwah Surabaya, 1993) hal. 1

telah digariskan oleh Allah dan RasulNya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan RasulNya.¹⁹

Sedangkan dakwah menurut terminologi mempunyai pengertian beragam namun mempunyai makna yang sama yaitu :

- Dakwah mengajak umat manusia dengan hikmat dan bijaksana untuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya.²⁰
- Dakwah mengajak umat manusia dengan cara bijak kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akherat.²¹

- Islam

Islam adalah ajaran Allah SWT untuk pedoman hidup manusia guna keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akherat yang telah diturunkanNya kepada semua Rasul-Nya semenjak nabi dan rasul pertama yaitu Nabi Adam sampai Nabi dan rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.²²

Pengembangan dakwah Islam dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas penyampaian ajakan Islam melalui berbagai metode yang dikembangkan dengan suatu tujuan terciptanya manusia yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan tentang fungsi pengorganisasian di MUI Jatim, maka pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Slamet Muhaimin Abda, *Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah* (Surabaya : Al Ikhlas, 1994) hal. 29-30

²⁰ Hamzah Yaqub, *Publistik Islam* (bandung : Diponegoro, 1986) hal. 13

²¹ Toha Yahya Komar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta : Wijaya, 1992) hal. 1

²² Bastanudin Agus, *Al-Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993) hal. 61

Bab II Perspektif teoritis meliputi kajian kepustakaan konseptual, kajian kepustakaan penelitian.

Bab III Metode penelitian yang membahas pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, wilayah penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Deskripsi lokasi penelitian yang meliputi letak lokasi MUI Jawa Timur, latar belakang berdirinya MUI, tujuan didirikannya MUI, perkembangan MUI, struktur organisasi MUI, komisi, lembaga, badan majelis di lingkungan MUI, visi dan misi MUI, orientasi dan peran MUI, program kerja MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah.

Bab V Penyajian dan analisa data., penyajian data Visi dan Misi MUI, Orientasi dan Peran atau fungsi MUI, rincian program komisi, program komisi yang sudah dilaksanakan atau dalam proses. Analisis data

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Kajian Kepustakaan Konseptual

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan-urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹

Karena manajemen diartikan “mengatur maka ada beberapa hal yang harus diatur antara lain :

a. Yang diatur

Adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, method, materials, machines, and market*, disingkat 6 M dan semua aktivitas yang timbul dalam proses manajemen itu.

b. Unsur diatur untuk

Agar 6 M itu berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinir dalam mencapai tujuan yang optimal.

c. Siapa yang mengatur

Agar searah maka dibutuhkan figure yang mengatur yaitu pemimpin.

d. Cara mengaturnya

Yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian = *planning, organizing, directing and controlling*).

e. Dibutuhkan

Suatu organisasi atau perusahaan karena organisasi merupakan alat / wadah (tempat) untuk mengatur 6 M semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya.²

Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil. Tercapainya tujuan

¹ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) hal. 1

² Malayu S.P Hasibuan, Hh. 1-2

organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, maupun politik sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. manajemen akan memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Untuk memperjelas arti manajemen, di bawah ini kutipan pendapat beberapa pakar di bidang manajemen. Pendapat yang satu dapat berbeda dengan yang lain walaupun terdapat kesamaannya, dari perbedaan-perbedaan pendapat (yang disebabkan karena perbedaan dalam menentukan titik berat sudut pandang” serta kesamaan-kesamaan itu diharapkan dapat diperoleh pandangan yang jelas dan menyeluruh tentang manajemen, yaitu :

1. Malayu Hasibuan³
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. G.R Terry⁴
Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
3. Andrew F. Sikula⁵
Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
4. Harold Koontz and Cyril O’Donnell⁶
Manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas orang

³ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* , hal. 2

⁴ Malayu S.P Hasibuan, hal. 3

⁵ Malayu S.P Hasibuan, hal. 3

⁶ Malayu S.P Hasibuan, hal. 3

lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

5. Robert Kreitner⁷

Manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang-orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber-sumber daya yang terbatas.

6. James A.F Stoner⁸

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

7. Hani Handoko⁹

Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

8. Sondang P. Siagian¹⁰

Manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil-hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Jika dibaca definisi-definisi di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:¹¹

1. Bahwa manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinir, kooperatif dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
7. Manajemen merupakan alat dalam mencapai tujuan.

⁷ Zaini Muhtarom, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 36

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1995), hal. 8

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hal. 10

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, hal. 5

¹¹ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 3-4

2. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian), sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian tugas ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan / formil dalam suatu organisasi. Disini pekerjaan yang sulit dan berat akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Pada dasarnya pentingnya manajemen disebabkan :¹²

- a. Pekerjaan berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b. Perusahaan baru dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik.
- c. Manajemen yang baik akan menghasilkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
- d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
- e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya dengan memanfaatkan 6 M dalam proses manajemen tersebut.
- f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- g. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
- h. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
- i. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang.

3. Asas-asas Manajemen

Asas (prinsip) adalah merupakan suatu pernyataan fundamental atas kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan.¹³ Asas bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus

¹² Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 4

¹³ Malayu S.P Hasibuan, hal. 9

mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, situasi dan keadaan yang berubah-ubah.

Asas-asas umum manajemen (*general principles of management*) menurut Henry Fayol :¹⁴

- a. *Division of work* (asas pembagian kerja).
- b. *Authority and responsibility* (asas kewenangan dan tanggung jawab).
- c. *Discipline* (asas disiplin).
- d. *Unity of command* (asas kesatuan perintah).
- e. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah).
- f. *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi).
- g. *Remuneration of personnel* (asas pembagian gaji yang wajar).
- h. *Centralization* (asas pemusatan wewenang).
- i. *Scalar of chain* (asas hierarchy atau asas rantai berkala).
- j. *Order* (asas keteraturan).
- k. *Equity* (asas keadilan).
- l. *Initiative* (asas inisiatif).
- m. *Espirit de corps* (asas kesatuan).
- n. *Stability of turn-over personnel* (asas kestabilan masa jabatan).

4. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen itu tujuannya adalah :¹⁵

- a. Supaya sistematis urutan pembahasannya lebih teratur.
- b. Agar analisa pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.

Berikut ini fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli.¹⁶

Tabel I

G.R. Terry	Jahn F. Mee	Louis A. Allen	Mc. Namara
1. Planning	Planning	Leading	Planning
2. Organizing	Organizing	Planning	Programming
3. Actuating	Motivating	Organizing	Budgeting
4. Controlling	Controlling	Controlling	System

¹⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 9

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, Hh. 16-17

¹⁶ Malayu S.P Hasibuan, hal. 1

Tabel 2

Henry Fayol	Harold Koontz & Cyril O'Donnel	S.P. Siagian	Oey Ling Lee
1. Planning	Planning	Planning	Perencanaan
2. Organizing	Organizing	Organizing	Pengorganisasian
3. Commanding	Staffing	Motivating	Pengarahan
4. Coordinating	Directing	Controlling	Pengkoordinasian
5. Controlling	Controlling	Evaluating	Pengontrolan

Tabel 3

W.H Newman	Luther Gullick	Lyndall F. Urwick	John D. Millet
1. Planning	Planning		Directing
2. Organizing	Organizing	Planning	
3. Asembling resources	Staffing	Organizing	Facilitating
4. Directing	Directing	Commanding	
5. Controlling	Coordinating	Coordinating	
6.	Reporting	Controlling	
7.	Budgeting		

Kenapa fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli tidak sama? Robert Tenenbaum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :¹⁷

1. Kompleksnya perusahaan karena jumlahnya sangat banyak maupun karena perkembangan lapangan usaha dan organisasi yang berbeda-beda.
2. Tidak adanya persamaan terminologi diantara ratusan pengarang yang menyangkut konsep yang sama.
3. Pemakaian kata-kata tanpa memperhatikan dengan serius arti dan nilainya.
4. Oleh masing-masing pengarang kurang diuraikan fungsi-fungsi manajemen lainnya.
5. Kadang-kadang diselipkan soal teknik kemahiran diantara fungsi-fungsi manajer.
6. Mencampuradukkan fungsi dan proses.
7. Deskripsi fungsi-fungsi sangat subjektif.
8. Mencampuradukkan fungsi dan kegiatan pekerjaan.

¹⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Hh. 16-18

Organisasi adalah alat wadah atau tempat dimana di situ berkumpul beberapa orang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan bersama.

Organisasi MUI adalah wadah atau tempat dimana di situ berkumpul para ulama, zuama dan agniya untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sesuai dengan visi dan misi MUI.

B. Pengorganisasian

1. Pengertian Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (*organizing* = pembagian kerja) adalah suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan-pengelompokan tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan., penetapan departemen-departemen (subsistem-subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. *Organizing* berasal dari kata "*Organism*" yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungan satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.¹⁸

Berikut ini ada beberapa pengertian tentang pengorganisasian.

a. Malayu S.P Hasibuan

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan mengatur bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.¹⁹

b. George R. Terry

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan / penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang

¹⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 22

¹⁹ Malayu S.P Hasibuan, hal. 23

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.²⁰

c. Soeisno Djodjosoedarso

Pengorganisasian adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dengan menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.²¹

d. T. Hani Handoko

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur optimal, mengelompokkan orang-orang serta menetapkan tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan dapat terciptanya suatu organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Tujuan Pengorganisasian

Proses pengorganisasian menurut M. Manulang mempunyai visual-visual sebagai berikut :²³

a. Memudahkan pelaksanaan tugas

Membagi-bagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Masing-masing kegiatan itu ditugaskan kepada orang yang cakap, akan mempermudah pelaksanaan tugas tersebut. Pembagian kegiatan atau pembagian

²⁰ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Mandar Maju. 1992) hal. 38

²¹ Soeisno Djodjosoedarsono, *Pengantar Manajemen* (Surabaya : Ekgro Print, 1990) hal. 11

²² T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta BPFE, Yogyakarta, 1999) hal. 167

²³ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1998) hal. 93

pekerjaan bermaksud selain untuk tumbuhnya spesialisasi juga untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas.

b. Memudahkan pengawasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disamping mempermudah pelaksanaan tugas maka mengorganisir bertujuan pula untuk mempermudah pimpinan mengawasi bawahan.

Dengan adanya pembagian aktivitas organisasi (perusahaan) yang ditugaskan kepada bawahan Jelaslah bagi pimpinan siapa-siapa yang akan bertanggung jawab melaksanakan tugas pada bagian-bagian tertentu dalam organisasi tersebut.

c. Mengkoordinir kegiatan

Selanjutnya mengkoordinir bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan agar tertuju kepada satu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pembagian aktivitas dalam organisasi dapat menghilangkan timbulnya duplikasi tugas, ketegasan tentang apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing pegawai, sehingga masing-masing kegiatan terkoordinir dan terarah.

d. Menentukan orang yang dibutuhkan

Akhirnya mengorganisir bertujuan untuk dapat menentukan orang yang dibutuhkan guna memangku tugas-tugas yang sudah dibagi tersebut. perincian tugas-tugas tersebut menjadi petunjuk siapa dan bagaimana orang yang dibutuhkan untuk memangku tugas-tugas tersebut.

3. Langkah-langkah Pengorganisasian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Proses pengorganisasian menurut Malayu S.P Hasibuan adalah sebagai

berikut :²⁴

- a. Tujuan manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama, kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan satu departemen atau satu bagian.

²⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 33-34

- d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.
- e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.
- f. Perincian peranan perorangan, artinya manajemen harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas terhindarkan.
- g. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai.
- h. Struktur organisasi (organisasi chart = bagan organisasi), artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan digunakan.

4. Manfaat Pengorganisasian

Melihat pada pengertian pengorganisasian oleh para ahli, tujuan pengorganisasian dan langkah-langkah pengorganisasian seperti diuraikan di atas, jelaslah betapa besar manfaat yang dipetik dari pengorganisasian, antara lain :²⁵

- a. Dengan adanya organisasi pengorganisasian yang efektif, setiap anggota dalam organisasi mengetahui benar bagaimana status dan perlunya dalam organisasi yang bersangkutan.
- b. Konsentrasi dalam tugas-tugas mereka akan lebih terjamin dengan adanya pengorganisasian yang baik dan tepat.
- c. Kesalahpahaman dan kebingungan dalam hal tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota dapat diperkecil dan dieliminir.
- d. Hubungan kerja dalam organisasi lebih dapat diperjelas sehingga masing-masing anggota dapat bekerja dengan lebih mantap.
- e. Tindakan-tindakan ataupun pelaksanaan tugas masing-masing individu dalam organisasi dapat dikoordinir secara lebih baik sesuai batas-batas yang berlaku sehingga kesatuan gerak organisasi mudah dicapai.
- f. Daya guna dan hasil guna dalam aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan lebih mantap dengan adanya pengorganisasian tersebut.

C. Pembagian Kerja

1. Pengertian Pembagian Kerja

- a. T. Hani Handoko

Mendefinisikan pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang terbatas.²⁶

²⁵ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1998) Hh. 96-97

b. Malayu S.P Hasibuan

Menyebut pembagian kerja adalah pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut.²⁷

c. A.M Kadarman

Pembagian kerja adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perlu dibagi menjadi kelompok-kelompok aktivitas sehingga setiap bagian yang diadakan tahu secara jelas aktivitas-aktivitas mana yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawabnya.²⁸

d. George R. Terry

Menyebutkan pembagian kerja adalah pengelompokan tugas-tugas atau kegiatan yang sama atau bertalian dengan itu ke dalam suatu unit kerja atau unit organisasi.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pembagian kerja adalah membagi keseluruhan tugas-tugas organisasi menjadi berbagai pekerjaan khusus yang memiliki aktivitas tertentu, aktivitas menguraikan apa yang harus dilakukan ada diselesaikan oleh orang yang mendapat pekerjaan tertentu.

2. Pedoman Dalam Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam suatu organisasi adalah keharusan karena pembagian akan dapat memberikan para anggota organisasi mengerti tugas dan kewajibannya masing-masing. Berikut hak wewenang dan tanggung jawabnya.

1. Jumlah unit organisasi diusahakan sedikit mungkin sesuai dengan kebutuhannya.
2. Suatu unit organisasi harus mempunyai fungsi bulat dan berkaitan status sama lain.

²⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hal. 167

²⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, hal. 30

²⁸ A.M Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta : Gramedia, 1996) hal. 65

²⁹ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, hal. 47

3. Pembentukan unit baru hanya dilaksanakan apabila unit-unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan-kegiatan baru tersebut baik karena beban kerja maupun kegiatan yang sangat berbeda.
4. Secara garis besar dalam suatu organisasi dibedakan sesuai organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Enam macam sifat unit organisasi yaitu :
 - a. Unit yang melakukan aktivitas penetapan kebijaksanaan umum bagi seluruh perusahaan.
 - b. Unit pimpinan yang melakukan aktivitas penerapan kebijaksanaan umum bagi berbagai kegiatan perusahaan.
 - c. Unit operasi yang melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan.
 - d. Unit penunjang (*servisant*) yang melakukan aktivitas yang membantu memperlancar unit operasi dalam melakukan unit.
 - e. Unit pengawasan yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan unit-unit operasi.
 - f. Unit konsultasi yang melakukan aktivitas memberi bantuan keahlian kepada unit pimpinan.³⁰

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, maka dalam pembagian kerja akan menghasilkan suatu unit-unit yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Persyaratan Pembagian Kerja / Tugas

Setelah pekerjaan-pekerjaan digolongkan sejenis menjadi suatu unit / departemen-departemen maka pekerjaan tersebut dibagi-bagikan kepada pemegang pekerjaan (*job holders*) sebelum pekerjaan dibagi-bagikan kepada pemegang pekerjaan harus diperhatikan persyaratan-persyaratan dalam pembagian kerja.

Dalam pembagian kerja perlu diperhatikan beberapa persyaratan dalam pembagian kerja, diantaranya :

1. *The right man in the right place* adalah mengusahakan efisien kerja yang baik. Efisien kerja diperoleh apabila penempatan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing pentingnya keahlian dalam menangani bidang dalam pekerjaan.

³⁰ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal 74

2. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan.
3. Memperhatikan *span of control* merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengawasi orang lain yang menjadi bawahannya.³¹

Dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut maka pemberian pekerjaan akan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tujuan dari pada organisasi dapat dicapai secara maksimal atau optimal.

Dan hal penting atau persyaratan yang lain dalam melakukan pembagian tugas hendaklah diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :³²

- a. Tiap-tiap satuan organisasi hendaklah memiliki perincian aktivitas yang jelas tertulis pada daftar perincian aktivitas.
- b. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling rendah harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas. Dengan telah dimilikinya daftar Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling rendah harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas. Dengan telah dimilikinya daftar perincian tugas bagi para pejabat maka dapat dihindarkan terjadinya pejabat yang bekerja hanya sekedar menunggu perintah.
- c. Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang pejabat sebaiknya berkisar antara 4 macam sampai 12 macam. Apabila seorang pejabat hanya disertai 1 macam tugas pada suatu saat akan jemu. Tiap pejabat sebagai layaknya seorang manusia pada umumnya membutuhkan variasi 4 macam tugas, diperkirakan merupakan variasi yang tidak menjemukan. Sebaliknya seseorang itu terbatas baik kemampuannya, kepandaiannya, kesehatannya maupun waktunya, maka jumlah tugas yang dapat diselesaikan dengan baik juga berjumlah terbatas.
- d. Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaklah diusahakan yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain sebab apabila seorang pejabat diserahi beban kerja yang sangat jauh berbeda variasi tidak akan dapat melakukannya dengan baik.
- e. Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban tugas masing-masing pejabat hendaklah merata sehingga dapat dihindarkan adanya satuan organisasi terlalu sedikit aktivitasnya. Demikian pula dapat dihindarkan adanya pejabat yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat yang sedikit tugasnya sehingga nampak terlalu banyak menganggur.

hal. 9 ³¹ Dydiet Hardjito, *Teori dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta :: Raja Grafindo Persada, 1997)

³² Sutrisno, *Metodologi Research III*, hal. 94-126

- f. Penempatan para pejabatnya hendaklah tepat yang dapat dijadikan dasar tepat. tidak hanya kecakapan atau kepandaian saja tetapi lebih luas dari itu. antara lain keberanian, jenis kelamin, kekuatan, umur, kesehatan, kejujuran dan lain-lain.
- g. Penambahan atau pengurangan pegawai hendaklah berdasarkan volume kerja. bila volume kerja bertambah banyak dan pejabat yang ada sudah tidak dapat menampungnya, adalah wajar bila pegawainya ditambah. Sebaliknya bila volume kerja susut maka jumlah pegawai juga dapat dikurangi. Jangan sekali-kali mengangkat pegawai terlebih dahulu baru kemudian memecah pekerjaan yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh pegawai yang sudah ada.
- h. Pembagian kerja terutama yang menyangkut para pejabat dalam suatu satuan organisasi. Jangan sampai menimbulkan pengkotakan pejabat-pejabat. Pembagian tugas hendaklah hanya sekedar menunjukkan perincian tugas yang menjadi tanggung jawab pokok bagi masing-masing pejabat tanpa mengurangi tanggung jawab pejabat itu sebagai anggota dari satuan organisasi sebagai keseluruhan, pembagian tugas jangan sampai menimbulkan pengertian antara pejabat saling lepas satu sama lain tidak saling bantu, tidak saling tanggung jawab atas keseluruhan organisasi.
- i. Penggolongan tugas
- a) Menurut pendapat Harold Zelko³³ ada 3 golongan tugas yaitu :
1. Berdasarkan penting dan urgensinya.
 - Tugas-tugas yang harus diselesaikan seketika.
 - Tugas-tugas yang harus dikerjakan seketika.
 - Tugas-tugas yang berjangka panjang.
 2. Berdasarkan sulitnya dan pemakaian waktu.
 - Tugas yang mudah dikerjakan.
 - Tugas yang sukar dikerjakan.
 - Tugas yang sulit dikerjakan
 3. Berdasarkan siapa yang akan mengerjakannya (berdasarkan pelaksanaannya).
 - Tugas-tugas yang dapat dikerjakan sendiri.
 - Tugas-tugas yang dapat dikerjakan bersama dengan bantuan orang lain.
 - Tugas-tugas yang dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Menurut Charles Broadet ada tiga macam tugas :
1. Pekerjaan rutin (hendaklah dilimpahkan sebanyak mungkin).
 2. Pekerjaan khusus yang perlu cepat diselesaikan (hendaklah disediakan waktu).

³³ Sutrisno, *Metodologi Research III*, h. 111-112

3. Pekerjaan kreatif (hendaklah diberi jatah waktu sebagian dalam setiap minggunya).
- j. Dalam melakukan pembagian kerja harus memperhatikan pula adanya beberapa dasar pembagian kerja, antara lain :
1. Pembagian kerja berdasarkan fungsi.
 2. Pembagian kerja berdasarkan produksi.
 3. Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja.
 4. Pembagian kerja berdasarkan langganan.
 5. Pembagian kerja berdasarkan jasa.
 6. Pembagian kerja berdasarkan alat.
 7. Pembagian kerja berdasarkan wilayah.
 8. Pembagian kerja berdasarkan waktu.
 9. Pembagian kerja berdasarkan jumlah.
- k. Untuk membantu ketepatan kerja beban para pejabat yang terutama kerja fisik dapat dilakukan dengan jalan melakukan perhitungan kerja, yaitu suatu cara untuk menghitung / mengukur banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pejabat.
- Tujuan utama perhitungan kerja adalah untuk mencapai keseimbangan antara beban kerja dengan tata kerja. Bagaimanapun baiknya suatu tata kerja kalau beban kerja terlalu berat, maka tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Perhitungan kerja dapat digunakan untuk beberapa maksud sebagai berikut :
1. Untuk mengatur pekerjaan.
 2. Untuk menggabungkan tugas atau peralatan kerja.
 3. Untuk membagi tugas secara mutlak.
 4. Untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai.
 5. Untuk menemukan letak suatu hambatan kerja.
 6. Untuk mendorong minat kerja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Pengembangan Dakwah Islam

Pengembangan dakwah Islam merupakan suatu perubahan yang tidak terkendali yang memerlukan dukungan semua pihak dan perubahan-perubahan tersebut diharapkan kegiatan organisasi dapat ditingkatkan pengembangan organisasi merupakan usaha yang menyeluruh bagi peningkatan kegiatan organisasi secara keseluruhan.

Pengembangan atau mengembangkan dapat berarti menjadikan perkembangan, maju, sempurna.³⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Dakwah Islam

Jika terdengar kata “dakwah” maka konotasi yang ada dalam gambaran seseorang yang sedang berdiri di podium (mimbar) menyampaikan pesan pidato dihadapan massa yang banyak jumlahnya. Bagi umat Islam kata dakwah bukanlah hal baru (asing) dan dalam sepek terjang kaum muslimin sendiri haruslah didasari untuk mengembangkan ajaran Islam yang disebut dakwah, kondisi yang demikian itulah pada akhirnya menghasilkan hati umat Islam yang tidak mampu bicara didepan umum tentang agama akan tetapi pengenalan orang terhadap istilah tidak terlalu menjamin jaminan bahwa orang dapat memahami dengan baik pengertian yang dikandung dengan istilah itu, demikian pula terhadap istilah dakwah meskipun istilah tersebut sudah cukup populer di Indonesia akan tetapi belum tentu setiap orang memahami pengertian dakwah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu merupakan sesuatu keharusan bagi setiap orang yang akan melakukan pembahasan tentang dakwah untuk itu terlebih dahulu memahami arti perkataan dakwah itu baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah.

Ditinjau dari segi bahasa dakwah berarti panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk perkataan itu tersebut dalam bahasa Arab disebut masdar sedangkan bentuk kata kerja atau fi'ilnya adalah da'a-yad'u berarti memanggil, menyeru atau mengajak³⁵

³⁴ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h.

³⁵ Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.7

Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan definisi yang bermacam-macam antara lain :

- a. Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya "*Hidayatul Mursyidin*" mengatakan dakwah adalah :
"Mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat"
- b. Toha Yahya Oemar, mengatakan bahwa dakwah adalah
"mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk ke maslahatan dan kebahagiaan mereka didunai dan di akherat".³⁶

Walaupun beberapa definisi dakwah diatas berbeda redaksinya akan tetapi setiap dakwah memiliki tiga unsur pengertian pokok yaitu :³⁷

- a. Dakwah adalah proses pencapaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain.
- b. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf (ajakan kepada kebaikan)
- c. Unsur tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam.

Dakwah adalah suatu porses upaya mengubah sesuatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, atau proses mengajak manusia kejalan Allah yaitu al-Islam. proses tersebut terdiri dari subyek dakwah (da'i) materi dakwah yaitu : Islam, metode dakwah, media dakwah.³⁸

Islam adalah agama dakwah karena disebarluaskan melalui aktivitas dakwah bukan melalui kebenaran, apalagi dengan kekuatan sengaja dan selalu mendorong pemiliknya untuk selalu aktif melakukan kegiatan dakwah. ada dua kemungkinan mengapa Islam tidak membenarkan pemaksaan yaitu :

- a. Islam adalah agama yang benar danajaran-ajarannya sangat masuk akal yang dapat diuji kebenarannya secar ailmiah
- b. Masuknya Islam kedalam kalbu manusia semata-mata merupakan hidayah Allah.

Jadi dakwah Islam yakni mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan

³⁶ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1993), h. 12

³⁷ M. Ali Aziz, h. 3

³⁸ Wardi Bactiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 1996), II.31

³⁹ M. Mansyur Amin, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, (Yogyakarta : Al-Amin Press, 1997)

diamalkan pendakwah sendiri.⁴⁰ Tugas dakwah yaitu tugas umat secara keseluruhan bukan hanya tugas kelompok tertentu umat Islam.⁴¹

Hubungannya antara dakwah Islam dengan para ulama, dzuama dan agniya hubungannya sangat erat yakni mereka sebagai subyek dakwah secara tidak langsung. Oleh sebab itu disini Organisasi Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah tempat berkumpulnya para ulama, dzuama dan agniya untuk melakukan tujuan bersama yakni salah satunya yaitu tentang dakwah Islam.

Sedangkan akhtivitas pengembangan dakwah islam yang dijalankan oleh komisi yang ada di MUI komisi pengembangan dakwah yakni mengembangkan ukhuwah islamiah antara sesama muslim dan pihak lain sebagai perwujudan dari dakwah sendiri, melakukan pelaksanaan dakwah didaerah-daerah khusus dengan perencanaan yang lebih komprehensif, oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan dakwah diperlukan peta dakwah dan pembuatan peta dakwah di MUI masih dalam proses dan sudah dimusyawarahkan, dan mengenai Media Dakwah yaitu media elektronik seperti radio. MUI akan membangun radio dakwah Asia Pasifik dan Nusantara daam berbagai bahasa, meskipun masih dalam tahap proses. juga menggunakan media dakwah media cetak yaitu berupa buku-buku terbitan MUI.

II. Kajian Kepustakaan Penelitian

1. Dalam skripsi yang berjudul Manajemen Organisasi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) dalam Rekrutmen Anggota Baru di Kodya Surabaya, oleh Muhaiminah,

⁴⁰ A. Hasamy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang : 1994), h. 17

⁴¹ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 17

2001, Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah (MD). Menyebutkan dalam perjalanan PITI, penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan) dan *controlling* (pengembangan) sudah mampu dijalankan, namun dalam konteks perencanaan untuk mendapatkan anggota baru belum memenuhi target yang ingin dicapai.

2. Studi Tentang Pengorganisasian Muslimat NU Tingkat Wilayah Jawa Timur dalam Mengembangkan Dakwah Islam, disusun oleh : Erni Sri Wahyuni, 2002, Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah (MD). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang punya targetan pula untuk pengembangan dakwah Islamiyah, akan muslimat NU melakukan pengefektifan dalam melakukan pengorganisasian di internalnya. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya dalam melaksanakan mulai dari program kerja sampai pada menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini semakin memuluskan agenda yang diembannya, yaitu mengembangkan dakwah Islamiyah.
3. Perencanaan Strategis dalam Pengembangan Dakwah Organisasi Islam (Studi Analisis Pada Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur), disusun oleh Rizqi Ibrahim, 2003 Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah (MD). Obyek penelitiannya adalah penerapan perencanaan strategis dalam pengembangan dakwah, mekanisme pengadaan program kerja dan skala prioritas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur dalam pengembangan dakwaha

adalah sesuai dengan proses perencanaan strategis dalam literatur yang dikemukakan oleh para ahli.

Dari kajian kepustakaan penelitian di atas, ada persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini yakni:

a. Persamaan

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang pertama dan kedua adalah sama-sama meneliti tentang organisasi atau pengorganisasian.

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang ketiga adalah persamaaan tempat penelitian yaitu di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.

b. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang pertama dan skripsi yang kedua adalah tempat atau obyek penelitian. Skripsi yang pertama di organisasi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Kodya Surabaya. Skripsi yang kedua di organisasi Muslimat NU Tingkat Wilayah Jawa Timur, sedangkan tempat penelitian skripsi ini di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur.

Dilihat dari segi isi ada perbedaan yaitu skripsi yang pertama tentang manajemen organisasi PITI dalam rekrutmen anggota baru. Skripsi yang kedua tentang pengorganisasian Muslimat NU dalam pengembangan dakwah hanya di lingkungan internal Muslimat NU, skripsi yang ketiga tentang perencanaan strategis dalam pengembangan dakwah di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur sedangkan skripsi ini tentang fungsi pengorganisasian di organisasi MUI dalam pengembangan dakwah Islam secara umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹

Deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masa sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana keadaannya. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.²

Adapun pendekatan yang penulis gunakan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah dan aktivitas MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam, kemudian menganalisisnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui pengorganisasian yang dilakukan oleh MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam.

Dalam penggunaan pendekatan kualitatif penulis menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yakni jenis penelitian deskriptif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek Edisi Revisi III* (Jakarta : Rineka Cipta) hal : 20

² Hadari Nawawi, H. Mimi Martin, *Penerapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996) hal. 73

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan perilaku secara holistik (utuh).³

Demikian Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan penelitiannya.⁴

Penelitian kualitatif adalah sebagai salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai bentuk penelitian alamiah yang dibangun atas dasar empirik sebab penelitian kualitatif ini dilakukan dalam setting alami di lapangan bukan di laboratorium menggunakan metode alami (observasi interview pikiran dan tulisan), jadi kesimpulannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk melihat pengorganisasian sebagai fungsi manajemen di MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam.

B. Wilayah Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Majelis Ulama Indonesia

Propinsi Jawa Timur tepatnya di jalan Darmahusada Selatan 5 Surabaya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

hal. 3 ³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)

⁴ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 3

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati atau dicatat untuk pertama kali dan pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan menggunakan metode survei, observasi dan eskperimen. Data primer yang dihimpun adalah aktivitas organisasi MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam dan fungsi pengorganisasian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Data yang dihimpun adalah data tentang MUI Propinsi Jawa Timur yang meliputi : sejarah berdirinya, latar belakang didirikannya, perkembangan, struktur organisasi, komisi-komisi, badan-badan / lembaga yang ada di MUI Jawa Timur, visi dan misi, orientasi dan peran, serta program kerja MUI Jawa Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sumber kepustakaan, yaitu mengambil data dari berbagai buku, dokumen atau arsip yang ada hubungan dengan pembahasan ini, seperti panduan penyelenggaraan organisasi dan manajemen MUI Jawa Timur oleh Drs. K.H. Imam Mawardi.

- b. Informan dengan responden yang ada kaitannya dengan penulisan ini, yaitu:

K.H. Abdussomad Bukhori.

- DR (HC) K.H. Imam Mawardi. Z.I

D. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Lexy menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penelitian yaitu :

1. Tahapan pra lapangan yang meliputi kegiatan :
 - a. Menyusun rancangan penelitian
Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian yang berbentuk proposal penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian
Peneliti memilih Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur sebagai lapangan penelitian.
 - c. Mengurus perizinan di lokasi penelitian
Pengurusan perizinan dilakukan peneliti dengan persetujuan dekan fakultas.
 - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
Peneliti telah melakukan dialog secara non formal dengan sebagian pengurus Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
 1. K.H. Abdus Shomad Bukhori
Selaku Ketua Harian di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini berhak memberikan informasi tentang organisasi MUI, kegiatan organisasi, fungsi manajemen dalam MUI Propinsi Jawa Timur.
 2. Drs. K.H. Imam Mawardi
Selaku Sekretaris Umum MUI Jawa Timur.
 3. Drs. Rudi Al-Hana, M.Ag.
Selaku Sekretaris Komisi Dakwah dan Tarbiyah Islamiyah.
 4. Drs. H. Masduki Hasyim, SH.
Selaku Bendahara Umum yang mengurus berbagai tugas kebhendaharaan MUI Jatim baik yang berkaitan dengan urusan bantuan dana / surat pertanggungjawaban (SPJ) rutin maupun program unggulan MUI lainnya, bertanggung jawab sepenuhnya dalam urusan pembukuan keuangan.

5. Pengurus-pengurus dan struktural MUI Propinsi Jawa Timur menjadi informan biasa yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, namun keberadaan mereka sangat membantu dalam memberikan informasi mengenai pengorganisasian MUI Jawa Timur.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
Peneliti dalam hal ini menyiapkan alat tulis dan perlengkapan lain yang mendukung dalam proses penelitian.
 - g. Etika penulisan
Peneliti menyesuaikan dengan tata cara yang berlaku di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur diantaranya dengan mengucapkan salam sebelum dan sesudah bertemu, mengisi daftar tamu.
2. Tahap kerja lapangan yang meliputi kegiatan berikut :
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan latar penelitian, di samping itu peneliti akan menyesuaikan dengan penampilan diri.
 - b. Memasuki lapangan
Dalam lapangan peneliti akan menempatkan diri dengan keakraban hubungan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
 - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data
Dalam hal ini peneliti akan melakukan pencatatan tentang hasil observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data yang lain yang sesuai dengan kondisi yang ada.
 3. Tahap analisa data yang meliputi kegiatan berikut :
 - a. Konsep dasar analisa data
Analisa data adalah pengorganisasian dan pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.
 - b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis
Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data dan ketika data-data sudah terkumpul maka akan ditemukan sebuah tema dan dapat dirumuskan hipotesis.
 - c. Menganalisa berdasarkan hipotesis
Peneliti akan melakukan analisa dengan emncari dan menemukan apakah hipotesis ini didukung oleh data dan apakah hal itu benar atau salah. Dan membuat laporan dari hasil penelitian.⁵

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III* (Yogyakarta : Andi Offset, 1993) hal. 114

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data mampu mengamati fenomena-fenomena yang ada dalam penelitian ini banyak cara yang digunakan akan tetapi tidak semua bentuk dapat menggunakan seluruh teknik yang ada disesuaikan dengan situasi yang menjadi subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Menurut Nursyam dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Dakwah observasi adalah serangkaian pencatatan dalam pengamatan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian secara sistematis dan sesuai penelitian.⁶ Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data aktivitas komisi pengembangan dakwah dan fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur.

b. Wawancara (interview)

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide.⁷

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengorganisasian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam.

c. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini metode dokumentasi karena metode ini tidak kalah penting dengan metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai sejarah berdirinya MUI, tujuan didirikannya MUI, perkembangan MUI, orientasi dan fungsi atau peran MUI yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁸

⁶ Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Solo : Rahmadani 1991) hal. 108
⁷ M. Nazir, *Panduan Wawancara* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998) hal. 234
⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hal. 206



F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengajukannya sebagai temuan bagi orang lain.⁹

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari faktor-faktor yang khusus / peristiwa yang kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat-sifat umum.¹⁰

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara dan sebagainya, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan deskriptif kualitatif yang holistik menggambarkan kondisi latar penelitian secara menyeluruh. Analisa data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, sebab dalam tahap ini semua hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dituangkan sekaligus pengukuran pendapat, rumusan-rumusan atau hukum-hukum teoritik yang dibangun.

Tujuan dari analisa ini adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Kegiatan analisa dengan cara ini dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah.

G. Teknik Keabsahan Data

Berikut ini adalah teknik keabsahan data menurut Lexy J. Moloeng.¹¹

1. Perpanjangan Keikutsertaan

⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996) hal. 104

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : YPPF UGM, 1987) hal. 82

¹¹ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 175-179

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Pada latar peneliti, sehingga akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaklah mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triagulasi

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam data itu. Keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu hal ini dapat dicapai dengan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara individu, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang ebrada, orang pemerintahan. (5) membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara. Atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Letak Lokasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur

Letak lokasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur di Jalan Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.

B. Latar Belakang Berdirinya

Berdirinya MUI Jatim tidak lepas dari perkembangan berdirinya Majelis Ulama Pusat di Jakarta. Usaha untuk mendirikan Majelis Ulama di tingkat pusat itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an, sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi-organisasi Islam dan pemerintah. Dalam Musyawarah Alim Ulama di Indonesia pada 30 September sampai 4 Oktober 1970 di Jakarta, yang diprakarsai oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII). Mereka merekomendasikan agar dibentuk Majelis Ulama yang didalamnya mencakup lembaga yang menangani masalah dakwah. Musyawarah tersebut mempunyai tema:

“Mewujudkan Kesatuan Alamiah Sosial Umat Islam dalam Masyarakat dan Partisipasi Alim Ulama dalam pembangunan Nasional”.¹

Keinginan untuk mewujudkan adanya Majelis Ulama di tingkat pusat itu tertunda karena agenda pemerintah awal tahun 1970-an memprioritaskan pemilihan umum tahun 1971 dan Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 1973.

¹ Ali Mufrodi, *Perkembangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jawa Timur. Laporan Penelitian* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1998), 13.

Harapan dan usaha itu semakin nyata dan kongkrit setelah adanya consensus bersama pada acara lokakarya Muballigh se-Indonesia pada 26 sampai 29 Nopember 1974 dengan hasil bersama yang isinya antara lain: untuk memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan diperlukan adanya Majelis Ulama atau semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien. Pembentukan mekanisme atau wahana ini diserahkan kepada daerah-daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan musyawarah antara ulama dan umara.

Majelis Ulama yang diharapkan oleh ulama itu juga diharapkan oleh Presiden Soeharto dalam amanatnya ketika lokakarya tersebut di atas, yang antara lain menyatakan "Membangun masyarakat juga tidak mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai berai tidak akan dapat membangun lebih-lebih apabila umat beragamanya tidak bersatu, karena itu, maka saya menyatakan agar dapat diusahakan suatu wadah atau forum di mana para ulama dan pemuka berbagai agama atau wakil-wakil dari organisasi keagamaan yang ada dapat berhimpun, berembug dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama yang berlainan".

Sebagai tindak lanjut dari consensus bersama dan amanat presiden tersebut, maka usaha-usaha untuk membentuk dan mendirikan Majelis Ulama mulai lebih diintensifkan. Di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri telah mengadakan persiapan-persiapan, sehingga pada bulan Mei 1975 telah berdiri Majelis Ulama di semua Daerah Tingkat I dan sebagian Daerah

Tingkat II, sedangkan di Tingkat Pusat dibentuk panitia persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah. Pimpinan ormas Islam tingkat Nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabdikan dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AL, Au, dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Dalam acara pembukaan MUNAS I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden mengemukakan bahwa

“Tugas para ulama adalah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama”.²

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur ada kaitannya dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia Pusat dan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia di beberapa

² Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jatim* (Surabaya: MUI Jatim, 2002), 14.

daerah. Di Daerah Istimewa Aceh sebelum tahun 1970 telah berdiri Majelis Ulama. Musyawarah alim ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada 17 sampai 18 Desember 1965 membuahkan Majelis Ulama Aceh yang diketuai oleh Tengku H. Abdulla Ujung Rimba. Tujuan didirikan Majelis ini adalah untuk mempersatukan potensi ulama dan umat Islam. Demikian juga di Jawa Barat telah berdiri Majelis Ulama, bahkan terbentuknya Majelis Ulama di daerah ini telah lama, yakni 12 Juli 1958. Berdirinya Majelis Ulama Jawa Barat antara lain untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah itu dengan adanya pemberontakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, di samping untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang diridhai Allah SWT dan untuk merealisasikan hukum-hukum Islam di bumi ini yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Majelis Ulama yang ada di Jawa Barat itu berdiri dari tingkat propinsi hingga ketingkat desa. Di Sulawesi Selatan demikian pula telah berdiri Majelis Ulama dan Sumatera Barat juga telah ada Majelis Ulama yang didirikan pada 27 April 1968.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur didirikan pada tanggal 7 Januari 1975 yang berkedudukan di Surabaya. Yang pertama kali diketuai oleh KH. Syafi'i Abdul Karim dan sekretarisnya adalah M. Sun'an Karwalip.

Demikian keadaan MUI Jawa Timur sejak berdirinya belum ada kantor atau tempat yang jelas, sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan rapat itu sementara di rumah KH. Misbach dan di Masjid al-Falah. Setelah pembangunan *Islamic Centre*, maka kantor Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur bertempat di *Islamic Centre* di jalan Dukuh Kupang 117-124 Surabaya, kemudian kantor Majelis Ulama

Indonesia Propinsi Jawa Timur pindah di jalan Darma Husada Selatan No. 5 Surabaya pada bulan Agustus 2001 sampai sekarang.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Tujuan Didirikan MUI

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur didirikan bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rokhaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT dalam negara RI yang berdasarkan Pancasila. Tujuan tersebut sesuai dengan yang ada dalam Pedoman Pokok MUI Pusat pasal III.⁴

D. Perkembangan MUI

Pada awal berdirinya, MUI telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra selain itu penerimaan masyarakat terhadap MUI sangat rendah, hal itu terjadi karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan Islam terasa kurang harmonis.

Ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan Rekayasa Sosial (Sosial Engineering) melalui kebijakan Floating Mass (Masa Mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Maka kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa dari pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah ormas Islam.

³ Wawancara dengan Imam Mawardi (Surabaya, 20 Desember 2004)

⁴ Keputusan MUNAS I Majelis Ulama Indonesia (Sekretariat MUI Jawa Timur, Jakarta, 1975)

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional tentang eksistensi dan tugas MUI.

Kepengurusan MUI di setiap jenjang berlangsung lima tahun sampai saat ini (tahun 2002) MUI telah menyelenggarakan enam kali Musyawarah Nasional (Munas) yang antara lain memilih kepengurusan baru dan sampai saat ini kepengurusan MUI tingkat pusat telah terselenggara dalam enam periode yaitu :

- Periode I (1975-1980) ketua umum Prof. Dr. Hamka.
Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan MA.
- Periode II (1980 – 1985) ketua umum KH M. Syukri Gozali Sekretaris umum HA. Burhani Tjokrohandoko Sebelum masa habis masa bakti H.A Burhani wafat digantikan H.A Qadir Basalamah.
- Periode III (1985-1990) Ketua umum KH. Hasan Basri Sekretaris Umum H.S. Prodkokusumo.
- Periode IV (1990 – 1995) Ketua umum KH Hasan Basri Sekretaris Umum KH. Hasan Basri Sekretaris Umum H.S. Prodkokusumo.
- Periode V (1995 – 2000) Ketua Umum KH. Hasan Basri sebelum masa bakti berakhir KH. Hasan Basri wafat digantikan oleh Prof. KH. Ali Yafir Sekertaris Umum Drs. H. Nazari Adlani.
- Periode VII (2000 – 2005) Ketua umum KH. Sahal Mahfudz Sekretaris Umum Prof Dr. H.M. Dien Syamsudin.

E. Susunan Pengurus MUI Jawa Timur (2000 – 2005)

I. Dewan Penasehat

- | | |
|--|-----------|
| 1. KH. Abdullah Faqih | Tuban |
| 2. Ust. KH. Abdurrahim Nur MA. | Sidoarjo |
| 3. RP. H. Muhammad Neor | Surabaya |
| 4. H. Imam Utomo | Surabaya |
| 5. Prof. DR. H. Ridwan Nashir, MA. | Surabaya |
| 6. KH. M. Bashori Alwi | Malang |
| 7. Prof. DR. H. Baldiri Mangundiwirja. | Surabaya |
| 8. KH. A. Zaki Gufron | Surabaya |
| 9. KH. Abdullah Syukri Zarkasy MA | Ponorogo |
| 10. KH. Tidjani Djauhari, MA | Sumenep |
| 11. KH. Syafii Sulaiman | Kediri |
| 12. Ust. H. Abdullah Umar Hubesy | Surabaya |
| 13. HM. Basofy Sudirman | Sidoarjo |
| 14. Drs. H.M. Roziqi MBA, MM | Surabaya |
| 15. KH. Fawa'id As'Ad | Situbondo |
| 16. Drs. H. Moh. Sobirin | Surabaya |
| 17. Drs. KH. Ali Maschan Musa Msi. | Surabaya |
| 18. Prof. Drs. H. Fasichul Lisan | Surabaya |

II. Dewan Pimpinan / Pengurus Harian

- A. 1. Ketua Umum : KH. Achmad Masduqi Mahfud

2. Ketua : Drs. KH. Abdusshomad Buchori
3. Ketua : Prof. Dr. KH. Syacrul Hadi Permono, SH, MA
4. Ketua : Drs. H. M. Roem Rowi MA
5. Ketua : Prof. DR. H. Bisri Afandi MA
6. Ketua : KII. MU'ammal Hamidy LC
7. Ketua : KH Miftachul Achyar
8. Ketua : Drs. H. Munawar Thohir
9. Ketua : Drs. KH. M Sahlan
10. Ketua : DR. H. Muhammad Thohir
11. Ketua : Drs. H. Muchibbudin Abbas SH, MH.
12. Ketua : HJ. Nur Endah Nizar LC
13. Ketua : DR. HJ. Sopaya Kiswati
- B. 1. Sekretaris Umum : DR. (HC) KH. Imam Mawardi Z.1
2. Sekretaris : Drs. H. Wahib El – Ghoni
3. Sekretaris : Drs. H. Imam Tabrani
4. Sekretaris : Drs. H. Abdurrahman Aziz Msi.
5. Sekretaris : Drs. H. Abdullah Faqih SH.
6. Sekretaris : Drs. H. M Yasin Fatisina
7. Sekretaris : Drs. H. Imam Choiri
8. Sekretaris : Hj. Istibsyaroh SH. M.Ag.
- C. 1. Bendahara Umum : Drs. H. Moh. Masduqi Hasyim SH.
2. Bendahara : H. Abdullah Mahin S.Ag.

3. Bendahara : H. M Mustofa Haris

D. Anggota Pleno

1. H.A Hudan Bandiri

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Prof. DR. H. Salahuddin Hardi MA

3. Drs. H. Abdul Ghafir

4. Prof. DR. H. Sodiqi SH.

5. Prof. DR. H. Soeroso Imam Zadjuli MA

6. Prof. DR. H. Abu Amar Yusuf

7. Drs. H. Hasyim A Manar Yusuf

8. Drs. H. Imam Hasan

9. Drs. KH. Loethfithoha

10. Drs. H. Achmad Syahbi

E. Komisi, Lembaga, Badan Majelis di lingkungan MUI.

1. Komisi Fatwa, penetapan hokum dan pengkajian perundang-undangan.

Ketua Komisi : Prof. DR. KH. Syaechul Hadi Poernomo SH.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wakil Ketua : DR. H. Ahmad Zahro MA.

Sekretaris : Drs. H. Faisholhaq M.Ag

Anggota : 1. Drs. HA. Salam Nawawi

2. Ust. H. Abdurrahman Navis LC.

3. Drs. H. Hasyim Abbas

4. Drs. H. Syamsud Dhuha

5. H. Budiman Notosuwiro SH.

6. Drs. KH. Yudi Iskandar Abdul Qowi

7. Drs. H. Mahfud Syamsul Hadi SH.

8. Drs. H. Turhan Badri Msi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Drs. H. Abdul Mudjib Hasyim

2. Komisi Dakwah dan Tarbiyah Islamiyah

Ketua Komisi : Drs. H. A. Hamid Syarif

Wakil Ketua : DR. Ali Aziz M.Ag

Sekretaris : Drs. Rudi Al-Hana M.Ag

Anggota : 1. Drs. Masyuruhn Said Msi

2. Drs. H. Fauzi Said Msi

3. Drs. H Athor Thohiri Msi

4. H Abdul Hamid Abdullah SH Msi

5. Drg H Hamim Fitroni Yahya M. Kes

6. A Aziz Oemar Basarahil

7. Dra Dakwatul Khoiroh M.Ag

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Drs. M. Fuad Romzi

9. Dra. Hj. Uji Aisiyah Msi

10. Dra Hj. Mihmidah Afif M.Pd

3. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan antar umat beragama.

Ketua Komisi : Drs. H. Ma'sum Umar

Wakil Ketua : Drs. H. Anis Thoha Albar

Sekretaris : Drs. H. Abdullah Ma'ruf SH. MM

- Anggota : 1. Drs. H. Ja'far Mawardi M.Ag
 2. DR. (HC) KH. Hasib A. Wahab
 3. Drs. H.M. Nizar Hasyim
 4. KH. Abdullah Wasi'an
 5. KH. Choiron Syakur
 6. Drs. KH. Syachul Ghulam
 7. Drs. H. Syukron Nasrullah
 8. Drs. H. Syukron Djazilan
 9. Drs. KH. Abdullah Mahrus.⁵

4. Komisi Pengembangan Ekonomi Islam

Ketua Komisi : KH. Imam Yahya Malik SE

Wakil Ketua : H. Saifuddin Nawawi

Sekretaris : H. Guntur Salahuddin

Anggota : 1. KH. Mahfudz Saubari MA.

2. Dra. Nurul Masyishto Msi

3. Drs. H. Musyaffak Nurhadi SH.

4. HA Ghozali Muhammad

5. Drs. Syaiful Islam

6. Ubaidillah Nurudin SE.

5. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Remaja dan Keluarga Sakinah

⁵ Dokumentasi Kesekretariatan MUI Jawa Timur

Ketua Komisi : DR. Hj. Hasniyah Hasan Msi

Wakil Ketua : Dra. Hj. Uji asiah Msi.

Sekretaris : Dra. Hj. Fatma Abbas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Anggota : 1. Dra. Syukur Hasyim

2. Dra. Hj. Masruroh Wahid

3. Drs. H. Hidayat Msi

4. Drs. A Rubaidi M.Ag

5. Drs. H.M Syamsul Huda SH. MHI

6. Dra. Hj. Dalilah Chandrawati M.Ag

7. Dra. Hj. Nurhayati M.Ag.

6. Komisi hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Ketua Komisi : Prof. DR. H. Syafiqmughi MA

Wakil Ketua : KH. Imam Gozali MA

Sekretaris : Drs. II. Abu Bakar ASSII.

Anggota : 1. DR. KH. Sumantri Zakariyah MA.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Drs. H. Fahrurozi Syata Msi

3. Drs. H. Achwan Mukarrom MA

4. Drs. H Suyuti Misbach

5. Drs. Hizbul Wathon⁶

⁶ Dokumentasi Kesekretariatan MUI Jawa Timur

Adapun lembaga badan yang ada di lingkungan MUI Pusat saat ini meliputi :

1. Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan minuman dan kosmetik (LP-POM)
2. Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Badan Arbitrasi Mu'amalat Indonesia (BA MUI)
4. Badan penerbit MUI
5. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan

MUI pusat juga telah membentuk sejumlah kelembagaan/ tim yang bersifat Ad-hoc seperti :

1. Tim Pencari Fakta Khusus Maluku (TPF-Maluku)
2. Dompok Amal Kemanusiaan
3. Tim peneliti/pengkajian kasus
4. Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA)
5. Aliansi Masyarakat Anti Pornografi⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁷ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jatim* (Surabaya: MUI Jatim, 2002), hal. 18-19

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Penyajian Data

1. Visi Dan Misi MUI

Visi : Terciptanya kondisi kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama zuama aghniyah dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (Al Islam Wa Al Muslimin) guna mewujudkan Islam yang dipenuhi rahmat (Rahmatan lil alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.

Misi : Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk Aqidah Islamiyah serta menjalankan Syariah Islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (Khair Al-ummah).¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Orientasi dan Fungsi atau Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 9 orientasi perkhidmatan yang perlu difahami, dihayati dan dijadikan pedoman bersama oleh segenap jajaran

¹ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jawa Timur* (Surabaya : Putra Pelajar, 2000) H.h. 6-7

pengurus/pimpinan MUI dalam mengemban fungsi, peran dan aktifitas *MUI* yaitu :

Diniyah : MUI adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Irsyadiyah : MUI adalah wadah perkhidmatan dakwah walirsyad, yaitu upaya mengajak umat kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI, dirancang untuk dakwah dan selalu "berdimensi" dakwah.

Ijabiyah : MUI adalah wadah pengkhidmatan yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal saleh) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (fastabiq al-Khoirot).

Hurriyah : MUI adalah wadah pengkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

Ta'awuniyah : MUI adalah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam.

Syuriyah : MUI adalah wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap

demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

Tasamuh : MUI adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat, sesuai dengan syari'at Islam.

Qudwah : MUI adalah wadah Perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat, sesuai dengan syari'at Islam.

Addualiyah : MUI adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Organisasi Islam Internasional di berbagai Negara.²

Lima Peran Utama MUI

1. Sebagai pewaris tugas para nabi (Warasat Al-anbiya), Yaitu : menyebabkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana, yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, MUI menjalankan fungsi profetik, yakni ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman

² Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI*.Jatim, lIh. 6-10

karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta, Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'yat wa khadim al ummah). MUI melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.
4. Sebagai gerakan Islah wal-tadjud, MUI berperan sebagai pelopor islah, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan Taidid, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam, maka MUI menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, MUI berperan sebagai wahana penegak 'amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran, dan kebatilan sebagai kebatilan, dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini, MUI tampil di barisan

terdepan sebagai kekuatan moral (Moral Force) bersama sebagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.³

3. Rincian Program Komisi-komisi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Berikut ini diuraikan program komisi sebagaimana telah ditetapkan di dalam

Musyawahar Nasional VI MUI tahun 2000.

a. Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah

- Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah).
- Pelaksanaan program Ukhuwah Islamiyah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang lemah iman, miskin materi maupun pendidikan.
- Mengusahakan berdirinya Pusat Islam (Islamic Centre) sebagai pusat kegiatan MUI dan kegiatan-kegiatan pembangunan umat.
- Melakukan konsolidasi organisasi MUI melalui berbagai cara, antara lain menyusun “Pedoman penyelenggaraan Organisasi MUI”, dan lebih mengakrabkan hubungan dengan ormas-ormas dan kelembagaan Islam.

b. Program Pengembangan Dakwah Islamiyah

- Membangun Laboratorium Dakwah yang penyelenggaraannya melibatkan para pakar komunikasi, psikologi, mubaligh, dan pendidik, yang ebrfungsi melakukan kajian untuk dapat menghasilkan panduan sistem, metode, materi

³ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jatim*, Hh. 7-10

dan dakwah yang sesuai dengan sasaran berbagai lapisan masyarakat dalam rangka perluasan dan efektifitas dakwah.

- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah-daerah khusus / terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif.
- Membuat pedoman dan peta dakwah dari tingkat pusat, daerah hingga kecamatan.
- Membangun radio dakwah Asia Pasifik dan Nusantara dalam berbagai bahasa.

c. Program Pengembangan Pendidikan Islam

- Meningkatkan koordinasi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah / madrasah maupun masyarakat.
- Meningkatkan mutu dan mengembangkan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama di tingkat pusat maupun daerah.
- Mengupayakan berdirinya Pusat Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Perpustakaan Islam berskala Internasional.
- Melakukan pembinaan dan evaluasi pendidikan agama dan akhlak bagi guru-guru agama maupun umum di setiap jenjang pendidikan.

d. Program Pengembangan Perekonomian Islam

- Mensosialisasikan pemahaman di kalangan umat bahwa mewujudkan kehidupan ekonomi yang berkualitas dan dapat dipercaya (amanah), merupakan salah satu bentuk ibadah.
- Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- 58
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada konsep syari'ah.
 - Mendorong pelaksanaan Undang-Undang Zakat dengan cara proaktif mendesak tersusunnya berbagai peraturan pelaksanaannya, membantu sosialisasinya dan ikut serta melakukan pengawasan pelaksanaannya.
 - Membuat proyek rintisan pendirian badan usaha nasional sebagai langkah menuju kemandirian MUI.
 - Melakukan upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi sistem ekonomi syari'ah sebagai alternatif terbaik dalam peningkatan kehidupan umat.
 - Membuat petunjuk teknis (Juknis) pengawasan atas pelaksanaan dan pemanfaatan benda-benda wakaf.
 - Mengusahakan berdirinya lembaga keuangan syari'ah di pusat dan di daerah.⁴

e. Program Pengkajian dan Pengembangan

- Melakukan kajian terhadap berbagai aliran agama / kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang memadai dalam usaha melindungi umat dari aliran agama / kepercayaan sesat.
- Melakukan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika guna memberikan rasa aman kepada umat dalam penggunaannya.
- Melakukan pengkajian-pengkajian atas penggunaan teknologi modern dengan menggunakan standar nilai-nilai Islam guna menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlak dan moral umat.

⁴ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jawa Timur* (Surabaya : Putra Pelajar, 2000) H.h. 39-44

- Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual.

f. Program Penetapan Hukum dan Fatwa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

- Mengembangkan kegiatan ilmiah syariah di kalangan umat mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tuntunan kebutuhan, dalam rangka memberikan tuntunan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
- Meningkatkan kedudukan dan peranan Komisi Fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah diantara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan sistematis.
- Peningkatan dan perluasan fatwa dengan mengundang ulama-ulama ASEAN atau lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hisab dan rukyah, makanan dan minuman halal dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
lain-lainnya.
- Pengembangan kajian-kajian hukum Islam yang mempunyai manfaat jangka panjang di dalam berbagai bidang mu'amalat dalam rangka mewujudkan tersusunnya Kodifikasi Hukum Islam Indonesia yang berisi ijma' ulama Indonesia.

- Pemasyarakatan hasil kajian ulama-ulama Islam pada umumnya dan masukan bagi penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan lembaga peradilan agama pada khususnya, maupun dalam rangka melayani kebutuhan akan nasehat agama dari berbagai pihak yang memerlukan seperti instansi pemerintah, lembaga swasta, perorangan umat Islam.
- Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pusat maupun daerah mempunyai kekuatan hukum positif.⁵

g. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan

- Peningkatan dan pengembangan kajian hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat maupun bahan perundangan.
- Melakukan Inventarisasi para pakar hukum Islam, hasil pendidikan di dalam maupun di luar negeri, untuk secara selektif diikutsertakan memperkuat MUI pada tingkat nasional maupun daerah.
- Mempersiapkan usulan / masukan bagi penyusunan RUU dan peraturan perundangan lainnya.
- Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam khususnya yang mempunyai manfaat jangka panjang di berbagai bidang muamallah dalam rangka tersusunnya kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berisikan ijma' ulama Indonesia.

⁵ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jawa Timur* (Surabaya : Putra Pelajar, 2000) H.h. 39-44

h. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri

- Meningkatkan peranan MUI dalam kerjasama antar bangsa khususnya pada berbagai event yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
- Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan negara-negara muslim dan umat Islam Internasional antara lain ketika menghadapi musibah dan bencana alam, perang saudara sebagai perwujudan solidaritas Islam.
- Meningkatkan silaturahmi antar bangsa-bangsa beragama Islam antara lain dengan mengadakan kunjungan timbal balik.

i. Program Kerukunan Antar Umat Beragama

- Memelihara kepekaan dan sikap tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi antar berbagai agama, khususnya yang timbul akibat pertentangan antar pemeluk agama yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan integrasi bangsa.
- Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi dalam kehidupan beragama, khususnya di kalangan pimpinan umat beragama dan pimpinan bangsa.
- Mengupayakan adanya undang-undang kerukunan antar umat beragama.
- Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majelis-majelis agama lain dan pemerintah.

- 62
- Melakukan studi atau pengamatan yang seksama dan terus menerus tentang kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia.

j. Program Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Meningkatkan kerjasama dengan badan / ormas / instansi terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan remaja dan keluarga.
- Melakukan sosialisasi kesetaraan gender di dalam masyarakat.⁶

4. Program Komisi-komisi yang Sudah Dilaksanakan atau Dalam Proses

a. Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah

- Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah).
- Pelaksanaan program Ukhuwah Islamiyah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang lemah iman, miskin materi maupun pendidikan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Contohnya yaitu dengan diundangnya MUI dalam suatu acara untuk berceramah pada masyarakat luas, diundang berceramah di masjid Al-Akbar pada waktu sholat Jum'at pada tanggal 14 Januari 2005.

⁶ Imam Mawardi, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jawa Timur* (Surabaya : Putra Pelajar, 2000) H.h. 39-44

- Melakukan konsolidasi organisasi MUI melalui berbagai cara, antara lain menyusun “Pedoman penyelenggaraan Organisasi MUI”, dan lebih mengakrabkan hubungan dengan ormas-ormas dan kelembagaan Islam, yaitu MUI menghadiri acara-acara keagamaan yang di dalamnya dihadiri juga oleh ormas-ormas dan kelembagaan Islam yaitu dari NU, Muhammadiyah.

b. Program Pengembangan Dakwah Islamiyah

- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah-daerah khusus / terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif, yaitu : peningkatan pilot proyek pengembangan dakwah bil hal untuk daerah transmigrasi, daerah terpencil dan pedesaan, kerjasama dengan beberapa mubaligh / da’i muda dengan mengembangkan dakwah bil lisan, serta menggunakan media massa / media cetak maupun media elektronika dan audio visual, dan juga penyajian materi dakwah yang menyejukkan hati, menarik dan mudah dicerna.

Sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu disusun konsep-konsep antara lain :

- Konsep-konsep materi Tabligh maupun dakwah yang penertiban bahan-bahan dakwah dalam bentuk buku saku.
- MUI membuat konsep dakwah terpadu, dimana dakwah tersebut di dalamnya melibatkan instansi yang terkait, yaitu dengan pihak kepolisian, Departemen Agama, ulama / mubaligh, pemerintah daerah (Pemda), Dinas Informasi dan Komunikasi.



- Membuat pedoman dan peta dakwah dari tingkat pusat, daerah hingga kecamatan. Membuat peta dakwah sedang dalam proses tetapi hal tersebut sudah dimusyawarahkan. Ada tim khusus dalam membuat peta dakwah ini diketuai oleh KH. Abdusshomad Bukhori sebagai Ketua Harian di MUI Jawa Timur. Sedangkan ketua pelaksanaanya adalah DR. KH. Imam Mawardi Z.I (sebagai Sekretaris Umum di MUI Jawa Timur) dan dibantu dari Depag Kakanwil, Penda, IAIN Sunan Ampel.⁷

c. Program Pengembangan Pendidikan Islam

- Meningkatkan koordinasi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah / madrasah maupun masyarakat. dalam hal ini menjadi wewenang Diknas MUI hanya memberikan motivasi atau dorongan pada pendidikan Nasional. Dan dalam hal menyikapi RUU Diknas, MUI Jatim dalam Rakerda membawa hasil RUU Diknas tersebut langsung ke MPR ditemui oleh Muhaimin Iskandar.
- Meningkatkan mutu dan mengembangkan pelaksanaan pendidikan kader ulama di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya di daerah telah melaksanakan Pusdiklat pada November 2000.
- Mengupayakan berdirinya pusat data dan pengembangan sumber daya manusia serta perpustakaan Islam berskala internasional, hal tersebut di tingkat pusat.

⁷ Wawancara dengan Abdusshomat Bukhori pada tanggal 20 Desember 2004 di MUI Jawa Timur

d. Program Pengembangan Perekonomian Islam

- Mensosialisasikan pemahaman di kalangan umat bahwa mewujudkan kehidupan ekonomi yang berkualitas dan dapat dipercaya (amanah), merupakan salah satu bentuk ibadah. Hal ini sudah dilakukan oleh MUI dalam rangka dakwah di bidang pengembangan ekonomi Islam.
- Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. MUI telah mensosialisasikannya dengan memberikan masukan dan pertimbangan BAZ (Bazis Amal Zakat) dan diminta beberapa kali dalam pelaksanaan BAZ di Jawa Timur termasuk dakwah Islam.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada konsep syariah. Hal ini masih dalam proses.
- Mendorong pelaksanaan Undang-Undang Zakat dengan cara proaktif mendesak tersusunnya berbagai peraturan pelaksanaannya, membantu sosialisasinya dan ikut serta melakukan pengawasan pelaksanaannya. Hal tersebut ditujukan kepada pemerintah.
- Mengusahakan berdirinya lembaga keuangan syariah di pusat dan di daerah, dalam proses 2005 melalui lokakarya dan ikut mendorong / memberikan dukungan kepada Bank Syariah yang sudah ada.

e. Program Pengkajian dan Pengembangan

- Melakukan kajian terhadap berbagai aliran agama / kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang memadai dalam usaha melindungi umat dari aliran agama / kepercayaan sesat. Hal ini dibahas dalam

Rakerda 2003 yaitu pernyataan sikap bersama MUI Jawa Timur mengenai adanya paham sesat.

- Melakukan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika guna memberikan rasa aman kepada umat dalam penggunaannya, yaitu melalui LPPOM yang dalam penanganannya ditangani secara insentif.
- Melakukan pengkajian-pengkajian atas penggunaan teknologi modern dengan menggunakan standar nilai-nilai Islam guna menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlak dan moral umat. Yaitu melalui seminar-seminar dan lokakarya. MUI disini bersifat pasif dan proaktif, bersifat pasif yaitu MUI diundang oleh lembaga kependidikan, kemasyarakatan, sedang yang aktif mengadakan seminar dan lokakarya.

f. Program Penetapan Hukum dan Fatwa

Semua program telah dilaksanakan dan dalam hasilnya MUI menerbitkan

buku-buku yaitu :

- Buku 101 Masalah Hukum Islam dan sebuah produk fatwa.
- Buku Pedoman Petunjuk Produk Halal.
- Buku Pedoman Berfatwa terjemahan dari kitab Adabul Mufti wal Mustafti oleh Drs. H. Ahmad Husnul Hakim, Ir, SQ, MA (dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an).

Buku-buku di atas sudah 4 kali penerbitan.

g. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan

- Meningkatkan dan mengembangkan kajian hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat maupun bahan perundangan.

Adalah dalam kesempatan sidang komisi fatwa atau sidang pengurus harian selalu dibicarakan, misalnya tentang produk perundang-undangan pemerintah yaitu UU No. 35 tahun 1999 tentang Zakat, Diknas, UU tentang Korupsi dan lain-lain.

- Melakukan Inventarisasi para pakar hukum Islam, hasil pendidikan di dalam maupun di luar negeri, untuk secara selektif diikutsertakan memperkuat MUI pada tingkat nasional maupun daerah. Hal itu belum tersentuh, baru dalam tahap upaya pada Proyek Jakarta (MUI pusat).
- Mempersiapkan usulan / masukan bagi penyusunan RUU dan peraturan perundangan lainnya. Misalnya, MUI di daerah memberikan masukan dan kritikan tentang RUU ke MUI Jawa Timur.
- Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam khususnya yang mempunyai manfaat jangka panjang di berbagai bidang muamallah dalam rangka tersusunnya kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berisikan ijma' ulama Indonesia.

h. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri

- Meningkatkan peranan MUI dalam kerjasama antar bangsa khususnya pada berbagai event yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
- Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan negara-negara muslim dan umat Islam Internasional antara lain ketika menghadapi musibah dan bencana alam, perang saudara sebagai perwujudan solidaritas Islam.
- Meningkatkan silaturahmi antar bangsa-bangsa beragama Islam antara lain dengan mengadakan kunjungan timbal balik.

Pada tahun 2000 MUI mengadakan kunjungan ke Singapura dan Malaysia yaitu dengan sasaran lembaga Majelis Ulama Jatim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang membahas masalah tentang yatim piatu, tabungan haji, pengelolaan zakat.

Pada tanggal 23 – 27 Juni 2003 MUI Jatim ke Malaysia yang dinamakan Travelling Seminar yang membahas tentang pelaksanaan syariat Islam di seluruh Malaysia yang dipimpin oleh Sekretaris Umum DR. KH. Imam Mawardi Z.I yang mengajak 6 orang.

Pada tahun 2005 berdasarkan keputusan Rakerda Jawa Timur pada tahun 2005 direncanakan ada kunjungan studi banding dan traveling seminar ke Malaysia dan Brunei Darussalam, dan sedang dalam proses persiapan dan penyusunan proposal sebagai tindak lanjut hasil bahasan Komisi R tahun 2005.⁸

⁸ Wawancara dengan Imam Mawardi pada Tanggal 20 Desember 2004 di MUI Jawa Timur

i. Program Kerukunan Antar Umat Beragama

- Memelihara kepekaan dan sikap tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi antar berbagai agama, khususnya yang timbul akibat pertentangan antar pemeluk agama yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan integrasi bangsa.

MUI Jawa Timur proaktif dan pemikiran-pemikiran konseptual kepada pemerintah daerah Gubernur Jawa Timur tentang kestabilan masyarakat dan kerukunan umat beragama melalui adanya pertemuan-pertemuan MUI diundang, misalnya kasus bom Bali MUI diundang Gubernur dan dari NU, Muhammadiyah juga.

- Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi dalam kehidupan beragama, khususnya di kalangan pimpinan umat beragama dan pimpinan bangsa.
- Mengupayakan adanya undang-undang kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut sudah dibuat oleh MUI pusat Jakarta ke Menteri Agama dan MUI Jawa Timur memberikan dukungan moral.
- Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majelis-majelis agama lain dan pemerintah. MUI Jawa Timur diundang dalam Temu Nasional Pemuka Agama di Makassar tahun 2003 bersama FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), Depag, Majelis Ulama Indonesia, perwakilan Walubi Budha, Katolik, Protestan, Hindu.

j. Program Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

- Meningkatkan kerjasama dengan badan / ormas / instansi terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diundang sebagai peserta, narasumber mengenai upaya pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur diadakan lokakarya pembekalan dasar kepada ulama

tentang HIV/AIDS, Narkoba bahkan hasilnya disosialisasikan ke seluruh Indonesia di Rakorda Wilayah III (Denpasar Bali, NTB, NTT). Bahkan KH.

Abdusshomad Bukhori diundang di Riau dalam lokakarya yang dihadiri 99 orang. MUI Jawa Timur dengan lembaga ormas-ormas Islam bersama-sama

mensosialisasikan akan bahaya HIV/AIDS dan menanggulangi HIV/AIDS.

Dilibatkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo sebagai tenaga partisipan lepas yaitu memberikan bekal rohani kepada pasien HIV/AIDS.

- Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan remaja dan keluarga.

MUI Jawa Timur memberikan / membuat konsep pada Rakorda MUI se-Jawa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada Agustus 2003 di Hotel Hilton di Komisi D masalah perempuan.

- Melakukan sosialisasi kesetaraan gender di dalam masyarakat.

Adanya anggota MUI Jawa Timur perempuan yang bergelar Doktor yaitu DR.

Hj. Hasniyah Hasan, MSi, DR. Hj. Soraya Kuswati. Hal ini membuktikan

MUI ikut mensosialisasikan kesetaraan gender dalam masyarakat.⁹

⁹ Wawancara dengan Imam Mawardi pada Tanggal 20 Desember 2004 di MUI Jawa Timur

B. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam analisis deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana keadaannya.

MUI mempunyai visi dan misi, dengan adanya visi dan misi tersebut MUI mempunyai landasan / pedoman dasar yang dijadikan tujuan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar kegiatan-kegiatan tersebut terarah sesuai dengan visi dan misinya MUI.

Fungsi pengorganisasian yaitu suatu proses untuk merancang struktur optimal mengelompokkan orang-orang serta menetapkan tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan dapat terciptanya suatu organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, pengorganisasian telah dilakukan / dilaksanakan oleh MUI Jawa Timur. Pengorganisasian adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Jadi MUI sudah melaksanakan manajemen dengan baik dalam memanaj organisasinya dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Dalam fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah Islam sudah dilakukan yaitu dengan cara membuat komisi pengembangan dakwah yang di dalamnya telah disusun orang-orang yang menjalankan / pembagian tugas, yaitu : komisi pengembangan dakwah Islamiyah dan Tarbiyah yang diketuai

oleh Drs. H.A. Hamid Syarif, wakil ketua DR. Ali Azis, MAg, Sekretaris Drs. Rudi Al Hana, M.Ag, anggota : Drs H Masyruchin Syakir, Drs. H. Fauzi Said, M.Si, Drs. H. Athor Thohiri, M.Si, H. Abdul Hamid Abdullah, SH, M.Si, Drg. H. Hamim Fitroni digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Yahya, M.Kes, A. Aziz Oemar Basarahil , Dra. Dakwatul Khoiroh, M.Ag., Drs. M Fu'ad Romzi, Dra. Hj. Uji Asiyah, M.Si, Dra. Hj. Mihmidati Afif, M.Pdi.

Program Komisi Pengembangan Dakwah

1. Program komisi pengembangan dakwah yang sudah dilaksanakan oleh Komisi

Pengembangan Dakwah yaitu dengan kegiatan-kegiatan/aktivitas antara lain :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah didaerah-daerah khusus/terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif, yakni peningkatan pilot proyek pengembangan dakwah bil hal untuk daerah transmigrasi, daerah terpencil dan pedesaan, contoh desa binaan di Jombang bekerja sama dengan beberapa mubaligh / da'i-da'i muda (IDMI) dengan mengembangkan dakwah bil lisan serta menggunakan media massa/cetak dan media elektronik, audio visual, serta penyajian materi dakwah yang menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat. Buku-buku hasil terbitan MUI Jawa Timur bisa dikategorikan dakwah bil qalam yaitu buku 101 Masalah Ilukum-Ilukum Islam dan sebuah produk fatwa MUI, buku Pedoman Petunjuk Produk Halal, buku Pedoman Berfatwa, yang kesemua buku itu disampaikan kepada masyarakat melalui dakwah bil lisan disampaikan secara langsung melalui bedah buku dan termasuk dakwah bil qalam.

33

Aktivitas MUI dalam pengembangan dakwah juga bisa berupa permintaan ceramah agama oleh masyarakat atau lembaga, instansi pemerintah. MUI memenuhi undangan dan dalam acara tersebut MUI Jawa Timur diminta untuk memberikan ceramah agama / berdakwah Islam.

MUI Jawa Timur membuat konsep dakwah terpadu dimana dakwah tersebut melibatkan instalasi yang terkait yaitu dengan pihak Kepolisian, Departemen Agama, ulama / mubaligh, Pemerintah Daerah (Pemda) Dinas Informasi dan Komunikasi.

b. Membuat peta dakwah dari tingkat pusat, daerah hingga kecamatan.

Membuat peta dakwah sedang dalam proses. Hal tersebut sudah dimusyawarahkan, ada tim khusus dalam membuat peta dakwah. Peta dakwah ini diketuai oleh KH. Abdusshomad Bukhori (sebagai Ketua Harian MUI Jatim). Sedangkan ketua pelaksanaannya adalah DR. KH. Imam Mawardi Z.I (sebagai Sekretaris Umum MUI Jawa Timur) dan dibantu oleh Depag, Kakanwil, Pemda, IAIN Sunan Ampel

2. Mengenai program Komisi Pengembangan Dakwah yang belum terlaksana adalah :

a. Membangun laboratorium dakwah yang penyelenggaraannya melibatkan pakar komunikasi, psikologi, mubaligh dan pendidik yang berfungsi melakukan kajian untuk dapat menghasilkan panduan sistem, metode, materi dan dakwah yang sesuai dengan sasaran berbagai lapisan masyarakat dalam rangka perluasan dan efektifitas dakwah. Program ini belum terlaksana karena

merupakan program MUI pusat, mungkin belum terlaksana karena adanya sesuatu masalah sehingga pembangunan laboratorium belum terlaksana.

- b. Membangun radio dakwah Asia Pasifik dan Nusantara dalam berbagai bahasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Program ini program pengembangan dakwah Islam MUI pusat Jakarta.

Jadi aktivitas pengembangan dakwah Islam oleh Komisi Pengembangan Dakwah sudah dilaksanakan oleh MUI Jawa Timur meskipun belum maksimal. Tiap-tiap komisi yang ada di MUI semua hasil aktivitas program secara tidak langsung ada kaitan dengan aktivitas dakwah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB VI

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Mengenai aktivitas organisasi MUI Jawa Timur dalam pengembangan dakwah yaitu mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah khusus contohnya yaitu di desa binaan di Jombang. Peningkatan pilot proyek pengembangan dakwah *bil hal*, *bil lisan* (ceramah), *bil qalam* yakni buku-buku hasil terbitan MUI Jawa Timur yakni buku 101 Masalah Hukum-hukum Islam dan Sebuah Produk Fatwa MUI, buku Pedoman Petunjuk Produk Halal, buku Pedoman Bertaqwa yang kesemua buku itu disampaikan melalui dakwah *bil lisan*, lewat bedah buku dan disampaikan ke masyarakat lewat dakwah atau ceramah agama.

Aktivitas MUI dalam pengembangan dakwah juga bisa berupa permintaan ceramah agama oleh masyarakat atau lembaga, instansi pemerintah, contohnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ceramah agama pada waktu sholat jum'at, pada waktu bulan ramadhan atau sholat tarawih dan MUI Jawa Timur memenuhi undangan seminar, acara-acara tertentu dan dalam acara tersebut MUI Jawa Timur diminta ceramah agama atau berdakwah.

2. Adapun mengenai fungsi pengorganisasian MUI Jawa Timur telah dilaksanakan atau diaplikasikan dengan membuat struktur atau susunan pengurus, dalam kegiatannya MUI telah membuat komisi-komisi yang di dalam komisi-komisi

tersebut terdapat program-program yang telah ditetapkan MUI dan dalam menjalankan tugas sudah ada pembagian tugas (*job discription*) masing-masing dan dilaksanakan oleh orang-orang yang telah mendapat tugas dan tanggung jawab.

MUI Jawa Timur telah melaksanakan manajemen dengan baik walaupun tidak sepenuhnya menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisaian dan pelaksanaan.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan kualitas maka ada beberapa saran :

- a. Untuk sebagian program-program komisi pengembangan dakwah Islam MUI Jawa Timur yang belum terlaksana hendaklah di masa yang akan datang diwujudkan agar semua program yang telah direncanakan dapat terwujud melalui aktivitas
- b. Hendaklah Pengurus harian dan pengurus komisi pengembangan dakwah Islam MUI Jawa Timur meningkatkan kinerja dan kedisiplinan kerja agar apa yang direncanakan dan yang dicita-citakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. 1993. *Al Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Ali Azis, Muhammad, *Ilmu Dakwah*, Diklat Fakultas Dakwah Surabaya.
- Amin, M. Mansyur. 1997. *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, Yogyakarta: Al-Amin Press
- Bahtiar, Wardi. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos
- Bukhori, Abdussomad dkk, *1001 Masalah Hukum Islam dan Sebuah Produk Fatwa MUI*, Surabaya propinsi Jawa Timur : Pustaka Da'i Muda.
- Djodjosoedarsono, Soeisno. 1990. *Pengantar Manajemen*, Surabaya : Ekgro Print
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Riset Jilid III*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hafifuddin, Didin. 1999. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Pres
- Hardjito, Didit. 1987. *Teori dan Teknik Pengorganisasian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Hasibuan, Malayu P. 1996. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta : Bumi Aksara,
- A. Hasimy. 1994. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Karebet dan Ismail, *Pengantar Manajemen Syariat*, Jakarta : Khoirul Bayan.
- Koentjoroningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara
- M. Karebet, Widjayakusuma dan Yusanto Ismail, *Pengantar Manajemen Syariat*, Jakarta : Khoirul Bayan.
- Maarif, A. Syafii. 1994. *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Jakarta: Bulan Bintang

- Manulang, M. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Martoyo, Soesilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Mawardi, Imam. 2002. *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen MUI Jawa Timur*, Surabaya : MUI Jatim
- Moleong, Lexy. , 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya
- Mufrodi, Ali. 1994. *Perkembangan MUI Tingkat I Jawa Timur*, Laporan penelitian, Surabaya : IAIN Sunan Ampel.
- Muhaimin, Slamet. 1994. *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, Surabaya : Al Ikhlas
- Muhtarom, Zaini. *Dasar-dasar Manajemen*.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya
- Nawawi, Hadari, H. Mimi Martin, 1966. *Penerapan*, Jakarta : Gajah Mada University Press
- Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia
- Nursyam. 1991. *Metodologi Penelitian Dakwah*, Solo : Rahmadani
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Rosyad Saleh, Abd. 1997. *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta.
- Subandi, Agus. 1987. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : OPP AMP YKPM
- Sukarna. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : Mandar Maju
- Yahya Oemar, Toha, 1992. *Ilmu Dakwah*, Jakarta : Wijaya
- Yaqub, Hamzah. 1986. *Publistik Islam*, Bandung : Diponegoro